

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kota Kupang telah mengeluarkan berbagai biaya yang berkaitan dengan kepentingan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah medis dan kesehatan lingkungan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengolahan dan pemusnahan limbah medis B3, biaya pengangkutan limbah oleh pihak ketiga, biaya pengawasan dan pengendalian sanitasi, serta biaya pendukung lainnya seperti jasa kebersihan dan pemeliharaan sarana. Namun, biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi dan diklasifikasikan secara khusus sebagai biaya lingkungan, melainkan masih tergabung dalam pos belanja operasional, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Pengelolaan biaya lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang secara administratif telah mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya dalam hal pencatatan belanja berbasis akrual. Namun, secara konseptual pengelolaan biaya lingkungan belum optimal karena belum terdapat sistem pengelompokan dan pelaporan biaya lingkungan secara spesifik. Biaya lingkungan masih diperlakukan sebagai bagian dari biaya operasional umum, sehingga menimbulkan biaya tersembunyi (*hidden cost*) dan menyulitkan evaluasi efektivitas serta efisiensi pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah medis.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan biaya lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Kupang telah memenuhi ketentuan SAP secara formal, penerapan konsep akuntansi lingkungan berdasarkan teori Hansen dan Mowen belum dilaksanakan secara menyeluruh. Total biaya lingkungan sebesar Rp708.288.185 hanya sekitar 0,50% dari total realisasi anggaran, yang menunjukkan bahwa alokasi biaya lingkungan masih relatif kecil. Selain itu, struktur biaya lingkungan belum mencerminkan prioritas pada biaya pencegahan dan deteksi, sementara biaya kegagalan internal masih cukup dominan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam perencanaan, pengklasifikasian, dan pengungkapan biaya lingkungan agar transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat ditingkatkan.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Kupang

Dinas Kesehatan Kota Kupang disarankan untuk mulai mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya lingkungan secara internal, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam SAP. Pengelompokan biaya lingkungan berdasarkan kategori biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal dapat digunakan sebagai alat bantu manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi lingkungan melalui pelatihan

dan sosialisasi, khususnya terkait penerapan konsep Akuntansi Manajemen Lingkungan (Environmental Management Accounting) di sektor publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah lainnya atau menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengukur besaran biaya lingkungan secara lebih rinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan akuntansi lingkungan di sektor publik.